

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prancis merupakan salah satu negara Eropa yang banyak melakukan kolonialisme dan imperialisme, termasuk di wilayah Afrika. Orang-orang Prancis pada umumnya menganggap tugas utama mereka adalah mengubah orang-orang Afrika menjadi orang Prancis yang lebih beradab. Ada keyakinan dalam pikiran banyak orang Prancis saat itu bahwa adanya suatu ikatan kultural dan politik antara Prancis dan jajahannya dapat jauh melampaui tujuan-tujuan ekonomi. Keseriusan Prancis untuk “memerancis-kan Afrika” bahkan membuat Prancis pada 1946 menjadikan orang-orang Afrika yang ada di wilayah jajahannya sebagai warga negara Prancis. (Kurniawati, 2010).

Sejak 1950-1960an, terjadi dekolonisasi besar-besaran di Afrika. Terhadap bekas koloninya di Afrika, Prancis tetap memberikan perhatian dan prioritas yang besar dengan membentuk *La Francophonie Africaine* atau Francophone Afrika, yang mana berarti negara-negara bekas jajahan Prancis yang menggunakan Bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka, tidak hanya bahasanya, namun juga kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik yang berkaitan dengan Prancis. Prancis mempunyai pengaruh dalam *la Francophonie Africaine* yang saat itu terdiri dari 18 negara di Afrika yaitu Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Gabon, Guinea, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Mali, Mauritania, Niger, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Senegal,

Pantai Gading, Togo, Zaire (Komoro, Djibouti sering dimasukkan sebagai negara Francophone meskipun bahasa resmi mereka bukan Prancis).(Krosiak, 2004).

Setelah dekolonisasi, Prancis tetap mengistimewakan hubungannya dengan Francophone Afrika karena baginya Francophone Afrika adalah simbol kebesaran Prancis yang akan menguatkan posisi Prancis di dunia. Bagi Prancis, imperium adalah simbol kebesarannya, tanpanya Prancis hanyalah sebuah negara seperti negara-negara lainnya. Maka makna Francophone Afrika bagi Prancis adalah pertama, aspek sentimental tentang hubungan Prancis dan Francophone Afrika; kedua, ide mengenai kebesaran Prancis di dunia; dan ketiga, keinginan untuk memelihara status Prancis di arena politik internasional.(Krosiak, 2004).

Ketergantungan Francophone Afrika terhadap Prancis terlihat nyata dalam ekonomi. Sejak 1947, Prancis membentuk Franc Zone yaitu bantuan budgeter dan perluasan hubungan dagang negara-negara Francophone dan Prancis yaitu (*Communaute Financiere Africaine*) CFA Franc. CFA Franc dijamin oleh Prancis dalam transaksi internasional sehingga mata uang asing yang dihasilkan ekspor disimpan di Prancis. Zona Franc dan CFA Franc yang bertujuan mengontrol pengeluaran dan sirkulasi mata uang, moneter, regulasi finansial, aktifitas perbankan, alokasi kredit, dan terutama budgeter dan kebijakan ekonomi. (Krosiak, 2004)

Dengan Zona Franc, Prancis mempunyai kekuasaan yang amat besar di Francophone karena bertindak sebagai bank sentral di Francophone Afrika yang berarti mengukuhkan kekuasaannya di Afrika bahkan setelah negara-negara Francophone Afrika merdeka kekuasaan Prancis justru semakin membesar. Dengan memberi bantuan ekonomi yang besar bagi Francophone Afrika, Prancis ingin mengukuhkan

posisi istimewanya di Francophone Afrika dengan memastikan tidak ada campurtangan asing lain di sana termasuk dari sekutu Baratnya.(Krosalak, 2004).

Perkembangan dunia dan dalam negeri Prancis pada 1990-an mengubah kebijakan Afrika Prancis yaitu dengan berakhirnya Perang Dingin, isu-isu globalisasi dan munculnya generasi baru pemimpin politik di Paris dan Afrika.(Krosalak, 2004). Pada tahun 1993, Doktrin Abidjan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Eduard Balladur menghasilkan pendekatan ekonomi liberal untuk Afrika. Doktrin Abidjan berisi devaluasi mata uang CFA-Franc dan membuka hubungan Prancis dengan negara Afrika non-Francophone, yaitu negara-negara yang bukan termasuk anggota dari Francophone Afrika seperti Nigeria, Kenya, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. (Krosalak, 2004).

Hingga kini Prancis semakin meningkatkan kerjasama dengan negara Afrika non-Francophone, salah satunya dengan Nigeria. Sebelumnya antara Prancis dan Nigeria belum pernah melakukan kerjasama bilateral sejak awal kemerdekaan Nigeria pada Oktober 1960 hingga akhir perang sipil pada Januari 1970. Alasan Prancis melakukan kerjasama dengan Nigeria yaitu karena Nigeria merupakan salah satu kekuatan kunci di kawasan Afrika, tidak hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi juga karena faktor politik dan ekonominya. (Ploch, 2019).

Nigeria memiliki tingkat ekonomi yang tinggi di sub-sahara Afrika dan menjadi salah satu negara penghasil minyak mentah yang berkualitas tinggi di dunia.(Ploch, 2019). Nigeria juga menjadi pemasok minyak mentah dari Afrika ke Prancis. Minyak dan gas alam merupakan sektor utama dalam perekonomian Nigeria, yang mana sebesar 88% merupakan investasi Prancis di Nigeria. Ada dua perusahaan besar di bidang perminyakan milik Prancis

di Nigeria yaitu *Elf Petroleum Nigeria Ltd* dan *TOTAL Nigeria Plc.*(CCI, 2016). Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang berlimpah, adanya sistem pemerintahan yang buruk dan banyaknya pejabat yang melakukan tindakan korupsi menyebabkan pembangunan di Nigeria menjadi lambat sehingga sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Nigeria termasuk ke dalam negara yang memiliki situasi politik yang mana sering terjadi konflik, hal itu dikarenakan adanya konflik etnis dan juga konflik akibat adanya perkembangan aliran agama yang berbeda. Sejak Nigeria merdeka pada tahun 1960, politisasi etnis kerap terjadi yang mana para elit dari setiap kelompok etnis yang berbeda saling bekerjasama untuk menguasai sumberdaya di Nigeria dan tidak mepedulikan integrasi negara pasca Nigeria merdeka. Etnis yang memiliki peran dominan secara politik yaitu Suku Fulani dan Suku Hausa dari wilayah Nigeria utara, serta Suku Igbo dan Suku Yoruba dari wilayah Nigeria selatan. Kelompok-kelompok etnis besar tersebut memiliki pasukan militer tersendiri sebagai pertahanan dan juga untuk melakukan serangan terhadap kelompok etnis yang lain. (Ploch, 2019)

Selain adanya konflik etnis, di Nigeria juga kerap terjadi konflik aliran agama yang berbeda, khususnya agama Islam. Penduduk di wilayah utara Nigeria diperkirakan hampir setengahnya menganut agama Islam. Wilayah utara Nigeria ini sebelumnya pernah mengalami perkembangan beberapa aliran agama yang berbeda. Contohnya, pada tahun 1980 terdapat aliran Maitatsine yang berkembang di Nigeria dengan mengklaim bahwa Nabi Muhammad bukan merupakan utusan Allah SWT. Aliran yang mulanya terbentuk di perkampungan bernama Kano ini beraksi secara brutal, dimana para wanita dan anak-anak dari

kelompok tersebut menyerang pasukan militer dengan menggunakan pisau dan juga busur-anak panah.(Paden, 2015).

Aliran lain yang berkembang yaitu Boko Haram, yang mana aliran ini memiliki cita-cita untuk menerapkan implementasi hukum syariah Islam di Nigeria. Pada mulanya Boko Haram menyebut diri mereka sebagai *Jama'ah Ahl as-Sunnah Li-da'wa wa al Jihad*. Namun, mereka lebih dikenal dengan nama Boko Haram yang berasal dari Bahasa Hausa yang artinya “ajaran dari Barat itu terlarang”.(Onuoha F. , 2014).

Sejak tahun 2010, serangan Boko Haram semakin gencar dan meluas. Serangan Boko Haram ini identik dengan pemakaian *improvised explosive device* (IED), bom yang dipasang pada kendaraan, dan serangan bom bunuh diri.(Ploch, 2019). Boko Haram menargetkan warga sipil seperti anak-anak sekolah, warga yang berada di gereja, pasar, maupun di tempat hiburan seperti diskotik. Mereka juga menargetkan tempat/bangunan milik negara seperti kantor polisi. (Muir, 2015).

Kemudian, pada 7 Maret 2015, melalui pesan audio singkat yang inti pesannya adalah Boko Haram mengumumkan kesetiaannya kepada ISIS (*Islamic State in Iraq and al-Sham*) dan akan selalu taat serta patuh kepada ISIS. Pengumuman tersebut dibuat dan disampaikan oleh salah satu tokoh penting Boko Haram yaitu Abubakar Shekau, yang ditujukan kepada pemimpin ISIS yaitu Abu Bakar al-Baghdadi.(Muir, 2015).

Presiden Goodluck Jonathan sebagai Presiden Nigeria sangat memberikan respon keras secara militer dalam melawan pemeberontakan Boko Haram.

Presiden Jonathan menyatakan keadaan darurat di tiga bagian negara di wilayah utara yaitu Bomo, Yobe, dan Adamawa pada Mei 2013 yang kemudian diperbarui lagi pada November 2013 dan Mei 2014. Pasukan militer termasuk Dinas Keamanan Negara dan polisi dikonsolidasikan ke dalam *Joint Task Force* (JTF) atau Satuan Tugas Gabungan.(Campbell, 2014).

Serangan-serangan yang dilakukan oleh Boko Haram ini tentu sangat mengancam perdamaian dan keamanan, tidak hanya di wilayah Nigeria namun juga terhadap negara-negara tetangga dan komunitas/organisasi internasional. Berbagai upaya telah dilakukan baik itu oleh Nigeria sendiri, pihak regional maupun internasional. Misalnya, upaya Uni Afrika dan negara-negara di kawasan Afrika untuk membentuk *Multinational Joint Task Force* (MNJTF), serta meminta PBB untuk membentuk dana perwalian dalam melawan kelompok Boko Haram. Selain itu, ada juga ECOWAS (*Economic Community of West African States*) yang mengadaptasi *Political Declaration and Common Position against Terrorism* pada tahun 2013 untuk memfasilitasi implementasi kebijakan dalam melawan terorisme.(Onuoha D. F., 2014).

Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, Sekretaris John Kerry serta para pejabat Amerika Serikat bersama dengan Prancis dan Inggris telah membahas konflik yang terjadi di Nigeria terkait dengan pemberontakan Boko Haram. Mereka juga telah memperkuat komitmen mereka dalam strategi melawan Boko Haram. Pada November 2013, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjuk Boko Haram sebagai *Foreign Terroris Organization* (FTO).(Ploch, 2019).

Kemudian, Prancis juga membantu Nigeria dengan memberikan dukungannya. Dukungan Prancis tersebut dimulai dari adanya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Paris pada 17 Mei 2014. Kepala Negara Benin, Kamerun, Chad, Prancis, Nigeria, Niger, serta perwakilan dari Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat turut bergabung pada pertemuan yang ditujukan untuk melawan Boko Haram. Lalu pada April 2016, Nigeria dan Prancis menandatangani perjanjian dalam hubungan kerjasama militer yang lebih dekat untuk memperkuat upaya perlawanan terhadap Boko Haram.(RFI, 2015).

Pada Mei 2016, Presiden Prancis Francois Hollande dan Presiden Nigeria Muhammad Buhari menandatangani *letter of intention* menjelang KTT untuk melawan Boko Haram di Nigeria. Penandatanganan tersebut memberikan peluang kesepakatan untuk kerjasama pertahanan yang berfokus pada terorisme dan juga pembajakan laut. Buhari memperkirakan upaya melawan Boko Haram membutuhkan dana sebesar € 960 juta (Rp 13,6 triliun). Sementara itu, Prancis telah menyiapkan sumbangan dana untuk mendukung Nigeria dan negara-negara tetangganya dalam melawan Boko Haram yaitu dana sebesar € 25 juta (Rp 356,1 milyar) untuk mendukung kerjasama antara tentara Nigeria, Kamerun, Chad, Niger, dan juga dana sebesar € 17 juta (Rp 242,1 milyar) untuk bantuan kemanusiaan di Nigeria.(RFI, 2015).

Dukungan Prancis tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya berbagai kerjasama dengan Pemerintah Nigeria dan memberikan bantuan dana terhadap Nigeria, meskipun Nigeria bukan termasuk negara anggota Franchophone. Namun, upaya yang dilakukan Prancis tersebut tidak terlepas dari kepentingan yang dimiliki oleh Prancis terhadap

Nigeria, sehingga dengan mempertimbangkan beberapa kepentingan yang dimiliki, Prancis memutuskan untuk membantu Pemerintah Nigeria dalam melawan pemberontakan Boko Haram di Nigeria pada tahun 2014-2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

"Mengapa Prancis memilih untuk membantu Pemerintah Nigeria melawan pemberontakan Boko Haram di Nigeria?"

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) merupakan konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Analisis seringkali menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. (Mas'ood, 1990).

Menurut Hans J. Morgenthau, arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Adapun kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan budayanya dari gangguan negara-bangsa lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan

spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama maupun konflik. (Mas'loed, 1990).

Kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan hidup bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target negara tersebut dalam waktu dekat, yang bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan dalam jangka panjang.(Mas'loed, 1990).

Mochtar Mas'loed di dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Kepentingan nasional menciptakan sebuah kerjasama yang dilakukan demi mempertahankan, melindungi, serta mensejahterakan negaranya, apabila suatu negara memperoleh hasil kemampuan minimum, sehingga kemampuan tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya kerjasama. Kemudian, suatu negara akan menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, yang mana strategi strategi tersebut dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya.(Mas'loed, 1990).

Konsep ini sesuai dengan kepentingan Prancis dalam membantu pemerintah Nigeria melawan pemberontakan Boko Haram di Nigeria,

yaitu: *pertama*, yaitu melindungi kepentingan ekonomi Prancis, terutama di wilayah Nigeria. Nigeria merupakan mitra dagang utama bagi Prancis di sub-sahara Afrika. Investasi utama Prancis di Nigeria adalah di bidang mobil, ban pneumatik, eksplorasi dan distribusi minyak, perbankan, dan konstruksi.

Kedua, melindungi dan menjamin keselamatan warga negara Prancis di wilayah Afrika Barat, yang mana diketahui bahwa Boko Haram telah beberapa kali menculik dan menyandera warga negara Prancis, baik itu yang sedang berwisata maupun yang bekerja di wilayah Afrika Barat dengan tujuan untuk meminta uang tebusan dari pemerintah Prancis maupun Nigeria.

Ketiga, yaitu melawan adanya tindakan terorisme. Boko Haram ini selain membahayakan keselamatan warga negara Prancis yang berada di wilayah Afrika Barat, juga menyatakan diri sebagai bagian dari ISIS dan termasuk ke dalam FTO (*Foreign Terrorism Organization*) sehingga perlu untuk dilawan secara bersama-sama.

D. Hipotesa

Berdasarkan pemaparan konsep yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa: Prancis membantu Pemerintah Nigeria melawan pemberontakan Boko Haram karena Prancis memiliki kepentingan yaitu *pertama*, melindungi kepentingan ekonomi negara Prancis, *kedua*, melindungi keselamatan warganegara Prancis di wilayah Afrika Barat, dan *ketiga*, perang melawan terorisme.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi kajian pada kepentingan Prancis dalam membantu Pemerintah Nigeria melawan pemberontakan Boko Haram di Nigeria pada tahun 2014-2016.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui kepentingan Prancis dalam membantu pemerintah Nigeria melawan pemberontakan Boko Haram di Nigeria. Metode penelitian kualitatif menurut John W. Creswell, merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi pada manusia, yang mana penelitian tersebut merupakan penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. (Creswell, 1994).

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, berita online, situs internet, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data yang telah tersedia serta mengorelasikan

hubungan antar variabel yang ada sehingga menghasilkan analisis yang tepat.